

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara terbesar saat ini adalah pajak. Dominasi pajak sebagai sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam memiliki batasan waktu yang relatif terbatas. Berbeda halnya dengan pajak, sumber penerimaan negara yang tidak akan terbatas yaitu pajak dimana pajak akan ada setiap waktu dan akan berkembang sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Peranan penerimaan pajak dari tahun ketahun di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan baik secara nominal ataupun secara prosentase terhadap seluruh seluruh pendapatan negara. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar

melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asa perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Hal ini disebabkan

masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak adalah terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara, Irianto (2005) dalam Vanes dan Hari (2009) dalam Widayati dan Nurlis (2010). Sedangkan menurut Suryaadi (2006) dalam Pancawati dan Nila (2011) Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi, budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara insentif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kedisiplinan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian Rahmanto (2012) dalam Agustina, Anwar, dan Eris (2015) semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Apabila kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*) tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi.

Kejujuran wajib pajak (*tax honesty*) Menurut Hartinah dalam Nofrianto (2013:7) dalam Agustina, Anwar, dan Eris (2015) ketika kesadaran wajib pajak semakin meningkat, maka dalam melaporkan pajak terutangnya wajib pajak akan berusaha menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara jujur sesuai dengan realita yang ada atau sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang akan dilaporkan. Kejujuran wajib

pajak sebagai sikap wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian tanpa pengaruh orang lain, aparat perpajakan, profesional, dan bersih. Pada saat kejujuran ini terpenuhi oleh wajib pajak, maka kemauan membayar dari wajib pajak akan meningkat.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan menurut Widayati dan Nurlis (2010) menyebutkan bahwa terhadap peraturan perpajakan terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak., maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami

mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan Keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bila SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian

system informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik.

Suryadi (2006) dalam Pancawati dan Nila (2011) melakukan penelitian tentang model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak di Jawa Timur, dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 800 wajib pajak pembayar pajak terbesar yang terdaftar di 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam lingkungan Kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur. Dari 8 KPP tersebut masing masing ditentukan 100 pembayar pajak terbesar yang diurut berdasarkan ranking, sehingga jumlahnya menjadi 800 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan, kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan system informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang

sama (Doney et.al., 1998). Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lainlain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis.

Pada penelitian James Alm et al., (2005) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut. Sedangkan dalam penelitian Henriket et al., (2005) yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan wajib pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi.

Pada kenyataannya masalah kemauan membayar pajak adalah masalah yang hanyalah masalah mau atau tidaknya wajib pajak membayarkan pajak penghasilan kepada kantor pelayanan pajak, maka



dari pada semua itu diperlukan faktor-faktor yang mendorong kemauan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya, dan faktor-faktor tersebut juga harus diuji supaya dapat membuktikan dan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak telah dilakukan peneliti sebelumnya diantaranya yaitu Widayati dan Nurlis (2010) serta Pahala, Hasanah, dan Sari (2013). **Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti di atas dengan menambahkan satu faktor yaitu persepsi wajib pajak mengenai beban pajak penghasilan dan menggantikan populasi dari KPP Pratama Gambir Tiga menjadi KPP Pratama Kabupaten Boyolali.**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN WIRAUSAHA (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BOYOLALI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ini akan meneliti tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan wajib untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdapat pada KPP Pratama

Boyolali sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
5. Apakah kualitas layanan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
6. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayarpajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kejujuran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya pada kantor pelayanan pajak yang ada di Kota Boyolali. Dan juga dapat memberikan pemahaman dan pengertian tentang manfaat pajak yang di bayarkan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pendorong untuk meningkatkan pelayanan pajak dan pemberian sosialisasi kepada wajib pajak supaya mengetahui tata cara penyetoran pajak pribadi bagi wajib pajak.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak.

### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain : kesadaran wajib pajak, kedisiplinan wajib pajak, kejujuran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas

layanan wajib pajak, kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi metode penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk meneliti.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian dan hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.

### **BAB V : KESIMPULAN**

Berisi kesimpulan yang merupakan pembahasan yang sebelumnya dan adapun saran ataupun masukan terhadap penelitian ini kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil yang telah diteliti.